

Peran Administrasi Negara dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Adzraa Livia Amri¹, Khalisya Dzihni Daulay², Shakti Ramadhan³, Nauval Putra Rangkuti⁴ Permadi Tarigan⁵, Tamaulina Br Sembiring⁶

^{1,2,3,4,5,6}Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi

Corresponding Author: ¹liviaara8@gmail.com, ²kicadzhni@gmail.com, ³saktibaik4@gmail.com,
⁴nauvalrangkuti2@gmail.com, ⁵permaditarigan05@gmail.com, ⁶tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id

Published: July , 2025

ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur memainkan peranan krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup Masyarakat. Di Indonesia, administrasi negara memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan, serta melakukan evaluasi terhadap proyek - proyek infrastruktur, baik di tingkat nasional maupun daerah. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi administrasi negara dalam pembangunan infrastruktur, dengan fokus pada kebijakan publik, koordinasi kelembagaan, dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis kebijakan, artikel ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembngnan infrastruktur sangat bergantung pada kapabilitas birokrasi, kejelasan regulasi, serta keterlibatan aktif sektor publik dan swasta. Namun demikian, sejumlah tantangan seperti tumpang tindih kewenangan, praktik korupsi, serta keterbatasan pendanaan masih menjadi hambatan serius. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi dalam sistem administrasi dan penguatan tata kelola agar pembangunan infrastruktur dapat berlangsung secara berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Kata Kunci : *Administrasi Publik, Infrastruktur, Kebijakan Publik, Tata Kelola, Indonesia.*

ABSTRACT

Infrastructure development plays an important role in driving economic growth while improving the quality of life of the community. In Indonesia, public administration plays an important role in formulating policies, coordinating implementation, and evaluating infrastructure projects, both at the national and regional levels. This paper aims to examine the contribution of public administration to infrastructure development, with a focus on public policy, institutional coordination, and the effectiveness of governance. Using a qualitative approach through literature review and policy analysis, this article shows that the success of infrastructure development is highly dependent on bureaucratic capabilities, regulatory clarity, and active involvement of the public and private sectors. However, a number of challenges such as overlapping authority, corrupt practices, and funding restrictions are still serious obstacles. Therefore, reforms are needed in the administrative system and strengthening governance so that infrastructure development can take place sustainably and evenly throughout Indonesia.

Keywords: *Administrasi Publik, Infrastruktur, Kebijakan Publik, Tata Kelola, Indonesia*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Di Indonesia, pembangunan menjadi agenda utama

dalam mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manajemen pembangunan meliputi berbagai aspek seperti perencanaan pembangunan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi program pembangunan. Manajemen pembangunan juga memerlukan kerjasama dan koordinasi antar berbagai aktor seperti pemerintah, swasta dan masyarakat. Infrastruktur didefinisikan sebagai semua fasilitas dasar fisik dan organisasi yang diperlukan untuk menjalankan suatu sistem atau kegiatan, baik pada tingkat individu, komunitas, maupun nasional. Infrastruktur yang baik sangat penting untuk kemajuan dan stabilitas negara atau wilayah mana pun tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga berpengaruh pada pelayanan publik termasuk di bidang pendidikan. Salah satu permasalahan infrastruktur yang masih menjadi tantangan di Indonesia adalah kondisi sarana prasarana pendidikan yang belum memadai, terutama di daerah terpencil dan tertinggal. Banyak sekolah yang masih kekurangan ruang kelas, mengalami kerusakan bangunan, minim fasilitas sanitasi dan juga keterbatasan akses teknologi. Kondisi ini hanya menghambat proses ngajar-mengajar, tetapi juga mencerminkan adanya ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur pendidikan. Namun di balik pembangunan infrastruktur yang besar ini, terdapat peran penting Hukum Administrasi Negara yang mengatur seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan dapat berjalan dengan baik, merata, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perlu di telaah bagaimana kebijakan implementasi administrasi Negara mampu berperan sebagai landasan hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalam pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana administrasi negara berperan dalam pembangunan infrastruktur. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. . Bagaimana peran administrasi negara dalam pembangunan infrastruktur pendidikan di Indonesia, terutama di daerah tertinggal?
2. Bagaimana upaya administrasi negara dalam mengatasi ketimpangan infrastruktur pendidikan di Indonesia pada daerah tertinggal?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran administrasi negara dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada norma hukum dan implementasinya secara kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran administrasi negara dalam pembangunan infrastruktur pendidikan di Indonesia di daerah tertinggal

Untuk memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kualitas pembelajaran, administrasi negara memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur pendidikan di Indonesia. Peran ini dimulai dengan perumusan kebijakan pendidikan dan menetapkan standar sarana dan prasarana sekolah, serta penyusunan rencana induk pembangunan infrastruktur pendidikan di tingkat nasional dan daerah. Bertanggung jawab atas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan proyek untuk pembangunan atau rehabilitasi sekolah, perpustakaan, laboratorium, fasilitas olahraga, dan fasilitas pendukung lainnya adalah pemerintah, melalui kementerian terkait seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta pemerintah daerah melalui dinas pendidikan. Administrasi negara juga bekerja untuk meningkatkan akses ke pendidikan, terutama di daerah terpencil dan tertinggal, dengan memberikan sumber daya yang lebih terarah dan skema dukungan khusus; mereka juga mengatur perizinan, pengadaan barang dan jasa yang transparan, dan mengawasi dan menilai proyek untuk memastikan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas hasil pembangunan. Mayoritas dana yang digunakan untuk infrastruktur pendidikan di Indonesia berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa setidaknya 20% dari anggaran harus dialokasikan untuk sektor pendidikan. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah sumber penting yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk membantu operasi sekolah dan pemeliharaan fasilitas. Selain itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berkontribusi melalui program investasi langsung atau tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Untuk menarik sektor swasta, proyek infrastruktur pendidikan berskala

besar seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai menggunakan Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Sumber pendanaan tambahan berasal dari masyarakat, seperti melalui komite sekolah, sumbangan, dan inisiatif swasta atau filantropi; ini menunjukkan bahwa berbagai orang bekerja sama untuk mendukung pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan di seluruh Indonesia.

Upaya administrasi negara dalam mengatasi ketimpangan infrastruktur pendidikan di daerah tertinggal

Sistem pendidikan di Indonesia sebagai jaminan dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan pendidikan yang merata tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tetapi ini bertolak belakang pada kenyataan bahwa hingga saat ini di tempat terpencil yang ada di Indonesia masih banyak sekolah yang belum mendapatkan fasilitas dan pendidikan yang layak. Banyak sekolah di daerah terpencil tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung pembelajaran yang efektif. Ruang kelas yang tidak cukup, meja dan kursi yang rusak, serta fasilitas sanitasi yang buruk adalah beberapa masalah yang sering dijumpai. Di beberapa daerah, bahkan ada sekolah yang tidak memiliki bangunan tetap dan terpaksa mengadakan kegiatan belajar mengajar di tempat yang tidak layak, seperti di bawah pohon atau di ruangan sempit tanpa peralatan dasar. (UNESCO, 2016).

Faktor utama penyebab ketimpangan pendidikan berawal dari permasalahan yang mendasar yakni: Pertama, keterbatasan akses dan infrastruktur pendidikan memadai. Kedua, kondisi geografis antara pulau satu dengan pulau lainnya memiliki jarak tempuh yang lama, sering kali akses jalan yang ditempuh hanya dapat menggunakan jalur laut untuk sampai ke sekolah. Ketiga, hambatan sosial dan budaya seperti konstruksi sosial yang menganggap pendidikan bukan menjadi hal yang penting dan sebagainya. Keempat, keterbatasan guru. Kondisi ini, sering kali menjadikan tiga Mata Pelajaran (Mapel) yang berbeda diampu oleh guru yang sama dikarenakan jumlah guru dalam lingkungan sekolah tersebut tidak mencukupi. Kelima, guru dengan kualitas rendah. Fenomena guru yang pilih-pilih tempat mengajar acapkali dilakukan. Mayoritas guru kebanyakan mengajar di daerah perkotaan sementara sangat sedikit guru dengan sukarela mengajar di daerah terpencil. Hal ini menjadikan sumber daya guru yang cakap sering kali ditemukan di kota besar (Maulido et al, 2024; Rahmadi, 2020).

Setiap wilayah memiliki kebutuhan yang berbeda sesuai kondisi demografi, ekonomi, politik, sosial budaya dan geografis masing-masing wilayah. Kondisi demikian juga berlaku untuk wilayah Indonesia terpencil dan kurang berkembang di bandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional (read, wilayah 3T tertinggal, terdepan dan terluar). Akses transportasi, listrik dan koneksi internet yang buruk menjadikan sulit meratanya kualitas pendidikan. Apalagi, Indonesia seringkali mengalami pergantian kurikulum yang menyesuaikan kebijakan Menteri pendidikan yang selalu berubah, dengan menyesuaikan kabinet Presiden Indonesia. Akibatnya, daerah terpencil sangat lambat dalam berkembang dan menyesuaikan kurikulum pendidikan yang baru (Tempo, 2023; Abduh et al, 2022).

Saat ini, kurikulum terbaru yang diimplementasikan di Indonesia adalah Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini dalam sistem pembelajaran yang semakin mengasah kompetensi murid dan kreativitas guru selaku tenaga pengajar. Sekolah negeri dan swasta di beberapa daerah sudah mulai merata menerapkan kurikulum yang menggunakan teknologi dalam setiap media pembelajarannya. Teknologi dan jaringan internet yang sengaja dirancang dalam sistem belajar-mengajar di kelas dan diterapkan dalam pengumpulan tugas menciptakan kebiasaan baru dalam pembelajaran (kemdikbud.go.id, 2024). Kondisi tersebut menjadikan wilayah terpencil belum mampu dalam menerapkan Kurikulum Merdeka lantaran kurangnya akses internet dan sumber daya guru yang cakap dalam menggunakan teknologi (Suroso, 2024).

Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu diambil tindakan yang direncanakan untuk menangani pendidikan di wilayah terpencil. Pertama, sekolah penggerak harus mendampingi sekolah di wilayah terpencil untuk berbagi pengetahuan tentang pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Kedua, tanggung jawab pemerintah daerah setempat untuk memperhatikan pendidikan di wilayah terpencil, seperti memperbaiki infrastruktur sekolah dan jaringan internet. Ketiga, lebih banyak guru yang berkualitas tinggi dan memiliki kemampuan untuk membantu Kurikulum Merdeka.

KESIMPULAN

Kebijakan implementasi administrasi Negara mampu berperan sebagai landasan hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalam pembangunan infrastruktur. administrasi negara

memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan, serta melakukan evaluasi terhadap proyek - proyek infrastruktur , peran penting Hukum Administrasi Negara dalam pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil seperti desa yaitu mulai dari menyusun kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan, serta melakukan evaluasi terhadap proyek - proyek infrastruktur pendidikan yang baik, merata, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Saran

Saran Untuk mengatasi ketimpangan infrastruktur pendidikan, terutama di daerah tertinggal, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pemerintah juga harus lebih serius dalam pengawasan anggaran agar penggunaan dana tepat sasaran dan bebas dari korupsi. Selain itu, penyediaan fasilitas dasar seperti listrik, internet, dan transportasi harus menjadi prioritas utama agar penerapan Kurikulum Merdeka dapat berjalan merata. Diperlukan insentif bagi guru yang bersedia mengajar di daerah terpencil agar kualitas pendidikan bisa meningkat. Kolaborasi dengan sektor swasta melalui program CSR dan kemitraan strategis juga sebaiknya ditingkatkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- UNESCO. (2021). Global Education Monitoring Report: The Challenge of Rural Education. Paris: UNESCO.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Laporan Kesenjangan Pendidikan di Indonesia. Jakarta: BPS.
- Kemdikbud.go.id. 2024. Kurikulum Merdeka. Diakses pada 22 Juli 2024. <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/hal/kurikulum-merdeka>.
- Maulido, Safiq., Karmijah, Popi., Rahmi, Vinanda. 2024. Upaya Meningkatkan Pendidikan Masyarakat di Daerah Terpencil. Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran dan Ilmu Sosial. 198-208.

Suroso, Edy. 2024. Daerah 3 T Terus Diupayakan Mendapat Akses Kurikulum Merdeka. Diakses pada 22 Juli 2024. <https://www.rri.co.id/daerah/683298/daerah-3t-terus-diupayakan-mendapat-akses-kurikulum-merdeka>.

Tempo. 2023. Mengatasi Ketimpangan Pendidikan di Daerah Tertinggal. Diakses pada 22 Juli 2024. <https://koran.tempo.co/read/pendidikan/485061/ketimpangan-pendidikan-di-daerah-3t>.

Idris. 2025. "Peran Administrasi Negara Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar Pada Daerah Tertinggal". *Jurnal Administrasi Negara* 3 no. 1: 319-328.